BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena suap atau korupsi di Indonesia sudah tidak asing hampir setaip hari kita mendengar berita tentang suap namun tidak semua orang dapat menjawab dengan benar apa itu perbuatan suap. Perbuatan suap telah terjadi dalam berbagai bentuk dan sifatnya oleh karena itu korupsi harus diberantas, lalu aturan yang melarang perbuatan suap yang berlaku hingga saat ini sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Negara kita perlu memiliki pedoman yang jelas mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari suap, ini diperlukan untuk menghindari praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, jika di biarkan rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Masalah suap merupakan salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi di dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya . Untuk lebih menjamin pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme maka, dibentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Permasalahan lain yang sering ditemukan dalam praktik di lapangan yaitu penerapan pasal oleh jaksa , pengacara, hakim biasanya dalam penjatuhan pasal

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi , *Memahami Untuk Membasmi* , buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi , Jakarta , 2006 , hlm 1.

² Evi Hartanti , *Tindak Pidana Korupsi* , Sinar Grafika , Jakarta , 2012 , hlm 1.

kasus tindak pidana korupsi terkadang tidak sesuai. Sebenarnya, Pelaku tindak pidana suap pemberi dan penerima suap selalu dijatuhkan dengan salah satu jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara sesuai dengan tindak pidana yang dianggap terbukti, sedangkan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan tergantung penilaian hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Saat ini dalam praktiknya hukum seringkali lemah untuk menyentuh pejabat tinggi yang melakukan tindak pidana korupsi. Kejahatan ini banyak dilakukan oleh seseorang dalam Institusi yang memiliki jabatan atau kewenangan kekuasaan tertinggi. Tindak pidana ini termasuk salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan dan menyangkut hak asasi ideologi Negara, perekonomian, keuangan Negara dan moral bangsa.

Hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi selalu ada, diantaranya seperti hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan dan sanksi, meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi.

Hukum sebagai suatu supremasi yang memiliki prinsip kepastian hukum saat ini masih menimbulkan beberapa keraguan masyarakat akan tujuan hukum itu sendiri dan politik kekuasaan yang ada. Khususnya dalam kasus suap-menyuap, korupsi, kolusi, dan juga Nepotisme (KKN).

Suap menyuap dalam kasus penggelapan dana-dana publik seringkali dikategorikan sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi, secara umum dapat diartikan sebagai perilaku yang bejat moral, atau perbuatan yang tidak wajar. Tindak pidana suap sebenarnya sudah ada pada Pasal 209-210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian lahir dan berkembanglah ajaran kriminologi yang menduduki posisi penting, dimana sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan dan tindak Kriminal, yang mana dalam penelitian ini yaitu tindak pidana suap menyuap atau kejahatan korupsi.

Konsep pertanggung jawaban pidana ialah syarat-syarat yang diperlukan untuk memberikan sanksi dan hukuman pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana. Proses yang menentukan pertanggung jawaban pidana tidak hanya melihat dan memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi bergantung pula pada syarat dan keadaan pelaku tindak pidana.³

Upaya pemerintah serta masyarakat sangat diperlukan untuk menanggulangi permasalahan korupsi, usaha ini terus dilakukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi usaha itu pun terwujud dengan di undangkannya undang undang nomor 13 tahun 2006 tentang saksi dan korban, cara penanggulangannya dengan memperbaiki bentuk sumber daya manusianya, atau sumber daya lainnya termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas kelembagaan penegak

³ K.A Abbas, *"The Cancer of Corruption"*, dalam Suresh Kohli (ed.), *Corruption in India*, New Delhi: Chetana Publications, 1975, hlm 26.

hukum. Dalam pemberantasan korupsi perlu di bangkitkan motivasi masyarakat agar berpartisipasi keikut sertaan masyarakat menurut Robert Klitgaard merupakan salah satu langkah untuk memerangi korupsi.

Salah satu upaya pemerintahnya yaitu dengan cara memperhatikan aspek kelembagaan, aspek kelembagaan yang perlu didayagunakan untuk menanggulangi korupsi adalah dengan membentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diantaranya yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Kasus nyata di sekitar kita dapat kita lihat dalam fenomena yang sering terjadi yaitu seringkali penegak hukum menerima suap untuk suatu perkara. contohnya mengenai oknum penegak hukum yang menerima suap yang di adili pada pengadilan negeri medan yang terdakwanya bernama Longser Sihombing, Longser terbukti bersalah karena ia menerima suap sebesar 200 juta saat ia menjabat sebagai kapolsek. Longser dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima hadiah atau pemberian suap itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Kapolsek Sukaramai.

Dalam perkara ini, AKP Longser Sihombing terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tim dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumut di salah satu lokasi di SPBU Jalan Kapten Sumarsono Medan pada 3 September 2016.

Contoh lain dari marakannya penegak hukum yang menerima suap dapat kita lihat dalam kasus yaitu ada Majelis Hakim yang menyatakan Eka terbukti menerima suap terkait proyek rehabilitasi saluran air bersih di Jalan Dr Supomo, Yogyakarta yang dilelang Dinas PU, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019 , yang menyatakan terdakwa Eka Safitra secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim Asep Permana saat membacakan amar putusan terhadap Eka Safitra dalam sidang melalui konferensi video. Hasil uang tersebut merupakan realisasi dari total komitmen fee 5 persen atas proyek pekerjaan rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Jalan Supomo CS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2019 yang dimenangkan oleh Gabriella menggunakan bendera perusahaan PT Widoro Kandang. Hukuman terhadap Eka lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang menuntut Eka untuk dihukum 6 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan.

Berdasarkan permasalahan diatas dan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana suap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, Penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYUAPAN TERHADAP PENEGAK HUKUM”** .

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam perumusan penelitian ini di tuangkan dalam identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban penegak hukum yang menerima suap di hubungkan dengan Undang-Undang korupsi?
2. Bagaimana tindak pidana suap yang dilakukan oleh penegak hukum oleh penegak dalam perspektif kriminologi?
3. Bagaimana upaya penanganan dalam menangani tindak pidana suap oleh penegak hukum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana pertanggung jawaban dari tindak pidana suap di lihat dari Undang-Undang Korupsi dan dari pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana praktek di lapangan tentang tindak pidana suap yang dilakukan oleh penegak hukum;
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana upaya yang dapat di lakukan apabila tindak suap di lakukan oleh penegak hukum;

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

a) Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan, ilmu pengetahuan serta pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama perkembangan ilmu hukum Pidana, dan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai terjadinya tindak pidana suap yang dilakukan oleh oknum penegak hukum.

b) Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana suap yang dilakukan oleh oknum penegak hukum agar dapat berguna bagi masyarakat serta para penegak hukum lainnya.

E. Kerangka pemikiran

Indonesia memiliki harapan agar dapat mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya pemberantasan tindak pidana korupsi sampai saat ini belum terlaksana secara optimal. Karena itu perlu adanya peningkatan yang professional, intensif, serta kesinambungan karena seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi telah memberikan banyak kerugian pada keuangan Negara, perekonomian Negara,

serta memberikan hambatan pula untuk pembangunan nasional. Sehingga perwujudan tujuan Negara itu sendiri sulit untuk dilaksanakan.

Perlu adanya langkah-langkah yang bersifat efektif dan efisien untuk mencegah tindak pidana korupsi. Hal ini dapat diwujudkan dengan suatu pendekatan secara komprehensif serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi optimalisasi pemanfaatan pembangunan guna terwujudnya kemakmuran rakyat.

Indonesia sebagai negara hukum haruslah dapat memberikan perlakuan yang sama untuk setiap warga negaranya. Hal ini kita kenal dengan istilah “*Equality Before The Law*”. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Melihat dari pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tadi maka siapapun yang melakukan tindak pidana haruslah diberikan sanksi atau hukuman yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk apabila aparat penegak hukum melakukan tindak pidana suap atau tindakan criminal lainnya.

Perlu kita ketahui bersama bahwa tindak pidana suap yang dilakukan oleh pegawai negeri dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Penyuapan aktif dan penyuapan Pasif. Pasal 209 KUHP mengatur tentang penyuapan aktif aktif (*actieve omkoopng* atau *active bribery*), dan Pasal 419 KUHP mengatur tentang penyuapan pasif (*passive omkoopng* atau *passive bribery*).

Hakim dan penasihat hukum di pengadilan seringkali menjadi subjek dalam tindak pidana suap. Hal ini diatur dalam pasal 210 KUHP. Dan ditegaskan kembali pada pasal 420 ayat (2) KUHP bahwa Hakim dan penasihat yang menerima suap akan diancam pidana selama-lamanya 12 tahun hukuman penjara.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap menjelaskan bahwa:

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”

Dilanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap yaitu :

“Menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).”

Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan bahwa Setiap tindakan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap.⁴ Setiap orang yang memberi ataupun menerima

⁴ M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan...* hlm.11.

suap akan dikenakan hukuman. Hal ini karena tindakannya telah merugikan oranglain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang perbuatan pidana suap terdiri dari:

1. Barang siapa
2. Menerima sesuatu atau janji
3. Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban.

Tindak pidana korupsi dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 atas perubahan nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yaitu korupsi aktif dan pasif. Salah satu contoh tindakannya yaitu Gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Teori mutlak (pembalasan), Teori ini menjelaskan bahwa perbuatan jahat menjadi dasar keadilan hukum. Hukuman akan diberikan karena seseorang telah berbuat jahat atau melakukan kejahatan. Jadi hukuman untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk membalas perbuatan itu (pembalasan).

Teori Absolut/retributif/ pembalasan (*lex talionis*) hukuman ialah suatu konsekuensi atas kejahatan yang dilakukan yang menjadikan seseorang yang salah maka harus dihukum. Pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana diartikan sebagai suatu pembalasan untuk seseorang yang melakukan tindak pidana.

Teori relatif (teori tujuan), teori ini menjelaskan bahwa pembalasan tidaklah menjadi dasar hukum akan tetapi lebih kepada maksud atau tujuannya. Tujuan pelaksanaan daripada hukuman terletak pada tujuan hukuman. Pokok pangkalnya adalah Negara, dimana negara melindungi masyarakat dengan cara membuat peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang berbentuk kaidah/ norma.

Ada beberapa golongan teori di dalam kriminologi antara lain yaitu menurut Soedjono Dirdjosisworo:

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland mengatakan bahwa *theory association* merupakan kejahatan yang berada pada pelaku kejahatan seperti:

- a. Perilaku kriminal sama seperti hal perilaku lainnya yang dapat di pelajari dan tumbuh berkembang.
- b. Perilaku kriminal merupakan hasil yang di pelajari dari sebuah proses interaksi atau komunikasi dengan orang lain.
- c. Inti dari mempelajari perilaku kriminal yaitu dari sebuah proses pergaulan yang intim dengan mereka yang melakukan kejahatan.

2. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori kontrol sosial ini menganggap bahwa individu itu merupakan orang yang tak patuh terhadap hukum yang berlaku, memiliki pandangan bahwa individu itu harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana atau suatu perilaku yang melawan hukum, teori ini untuk mengontrol sebuah perilaku serta terdapat larangan-larangan agar individu itu tidak melawan hukum.

Di dalam teori ini terdapat empat unsur kunci agar individu bisa mengontrol perilaku kriminal jika perilaku mendapatkan unsur-unsur dibawah ini dapat meminimalisir suatu perbuatan kejahatan, menurut Hirschi (1969) yang meliputi :

a. Kasih Sayang

Kasih sayang ini merupakan suatu bentuk perhatian yang dapat mengontrol kejahatan kriminal karena individu ini akan merasa puas serta tidak merasa kekurangan dalam hal kasih sayang, individu ini akan merasa bahwa ada ikatan dengan keluarganya atau merupakan suatu ikatan antara individu dengan orangtua, guru, serta saluran primer sosialisasi.

b. Komitmen

Komitmen ini merupakan suatu teori yang berhubungan dengan tujuan atau suatu keinginan yang telah kita rencanakan yang ada pada diri kita agar sesuai dengan apa yang kita ucapkan yang memiliki tujuan agar tidak bertentangan dengan gaya hidup yang menyimpang

c. Keterlibatan

Teori ini menjelaskan bahwa keterlibatan ini dapat di lihat dari bagaimana seseorang itu ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan konvensional yang

Dapat dihargai masyarakat ⁵ .

3. Teori Kehendak (*willstheorie*)

Teori ini menerangkan bahwa kehendak merupakan suatu perilaku yang sengaja untuk melakukan sesuatu perbuatan, sesuatu yang dikehendaki oleh pelaku, perbuatannya dengan sengaja yang merupakan suatu kehendak atau suatu keputusan yang merupakan suatu perbuatan dan menimbulkan akibat tertentu.

⁵ Yesmil Anwar Adang , *Kriminologi* , Reflika Aditama , Bandung, 2010 , hlm 21.

4. Teori Pengetahuan dapat dapat membayangkan/persangkaan (voorstellingsheorie)

Teori ini menjelaskan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai.

Menurut moeljatno yang termasuk tujuan pidana tersebut harus mencakup dua hal yaitu yang pertama harus bisa menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan terhadap pelaku kejahatan, lalu dengan melakukan pertimbangan serta melihat terlebih dahulu kesalahan pelaku dapat di pidana atau tidak. Yang kedua harus mencakup tujuan pidana yaitu berupa memelihara solidaritas masyarakat, yang tujuan pidana itu untuk mengarahkan agar bisa memperthankan kesatuan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu proses agar masyarakat bisa hidup damai serta tentram yang dapat melibatkan banyak hal , penegekan hukum menurut Joseph Goldstein di bedakan menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain.

- 2) Mencakup sebuah aturan untuk melakukan suatu proses pemeriksaan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan, karena untuk menyatakan seseorang itu bersalah atau tidaknya harus benar benar memerlukan proses penyidikan, tidak bisa sembarangan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 3) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal.
- 4) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁶

Dari sudut pandang kriminologis faktor atau penyebab terjadinya korupsi yaitu dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor, faktor pertama penyebab seseorang melakukan korupsi yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat di dalam diri manusia

⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta , 1988 , hlm 32.

maksudnya yaitu adanya niat dari pelaku seperti keserakahan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri manusia maksudnya yaitu adanya sebuah kesempatan atau sebuah dorongan dari faktor sosial, faktor politik atau penegakan hukum.

Menurut Jack Bologne Gone Theori, menjelaskan bahwa teori tindak pidana terdapat faktor faktor penyebab korupsi yaitu adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap orang karena setiap individu selalu merasa kurang dan yang berkaitan dengan individu pelaku korupsi.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analistis , penelitian ini berguna untuk menjelaskan suatu objek penelitian yang kemudian di analisis . Menganalisis dari hasil penjabaran dari objek penelitian.

Berdasarkan gambaran penelitian deskriptif analistis di atas penulis akan melakukan penelitian ini guna untuk memecahkan masalah yang berkaitan tentang Tinjauan yuridis kriminologis terhadap penegak hukum yang menerima suap di hubungkan dengan Undang-Undang tindak pidana korupsi Jo. pasal 209 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat di dalam hukum positif serta pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*).⁷

Peneliti juga menggunakan penelitian yuridis empirik, yaitu hukum merupakan suatu gejala yang ada dimasyarakat yang merupakan suatu prilaku yang mempola , pendekatan ini di kenal dengan penelitian hukum yang empirik atau sosiologis.

3. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam data yaitu terdiri dari :

- a) Kepustakaan (*Library Research*), yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap kekuatan mengikatnya, lalu dapat dibedakan menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta , 1990 , hlm 34.

sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari.⁹
 - i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV
 - ii. Undang Undang No.20 tahun 2001 Atas perubahan No.31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
 - iii. Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - iv. Peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penafsira hukum terhadap tindak pidana suap Undang-Undang No.11 Thn 1980.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubunganya dengan Penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus- kamus hukum.

b) Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan memperoleh data primer yang dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan narasumber atau responden secara langsung dengan pihak yang terkait dengan kasus penegak hukum yang penerima suap.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. dengan demikian akan dilakukan dua kegiatan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) Sebagai berikut :

a) penelitian kepustakaan (*Library Research*)

a) Pengumpulan buku buku dan peraturan perundang undangan tentang penegak hukum , penerima suap serta penyusunan:

1. Klasifikasi yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan melalui bahan hukum primer , sekunder dan tersier.
2. Sistematis yaitu menyusun data data yang diperoleh dan telah di klasifikasi menjadi uraian yang sistematis.

b) Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara dengan

responden atau narasumber langsung dengan pihak yang terkait dengan penegak hukum yang menerima suap.

5. Alat pengumpulan data

Data yang sudah terkumpul melalui Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendukung data sekunder yang telah diperoleh, untuk mendapatkan korelasi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik yang akan di gunakan untuk pengolahan data sekunder dan data primer.

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan bahan lainnya dalam penulisan ini.

b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait dengan permasalahan yang di teliti baik menggunakan pedoman wawancara terstruktur atau wawancara bebas dimana peneliti menggunakan perekam suara sebagai alat penting sebagai penunjang penelitian dalam melakukan wawancara.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data peneliti menggunakan metode analisis normatif, yaitu metode untuk menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan yang kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) yang dipakai dan melalui proses akan diperoleh kesimpulan (conclusion) terhadap permasalahannya.

Peneliti menganalisis dan membahas tentang korupsi, korupsi merupakan suatu usaha untuk memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak orang lain yang mengambil milik orang lain untuk membuat puas diri sendiri yang secara harafiah istilah korupsi memiliki arti sangat luas, yaitu:

- 1) Korupsi yaitu berupa penyelewengan atau penggelapan memakai uang negara atau perusahaan dan sebagainya, untuk memuaskan hasrat kepentingan pribadi dan orang lain.
- 2) Korupsi merupakan hal yang busuk, rusak, dan yang korupsi suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, biasanya dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang di kaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitiannya yaitu.

Penelitian kepustakaan berlokasi :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Parahyangan jalan ciumbuleuit No 94 Hergamanah
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran jalan dipatiukur No 35 Bandung
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Besar No 68 Bandung
4. Dispusida Provinsi Jawa Barat jalan kawuliyaaan indah II, Sukarno hatta No 4 Bandung

8. Jadwal Penelitian

Judul Skripsi Tinjauan yuridis kriminologis terhadap penegak hukum yang menerima suap dihubungkan dengan Undang Undang No.20 tahun 2001 Atas perubahan No.31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Nama : Jenny Rahmawati Pupsachani

No pokok mahasiswa : 161000204

No SK Bimbingan : 257/UNPAS.FH.D/Q/X/2019

Dosen Pembimbing : Yesmil Anwar,S.H.,M.Si.

No.	Tahap-tahap Kegiatan	2019-2020					
		Bulan					
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						